

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan objek penelitian pengawasan melekat, pemeriksaan internal, dan pencegahan *fraud* pada pemberian dana hibah.

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

Visi

Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, dan Sejahtera Tahun 2025

Misi

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas, dan mandiri.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang lebih merata dengan memperhatikan aspek lingkungan yang asri dan lestari.

3.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 7°02'29" – 7°49'08" Lintang Selatan serta 107°54'10" – 108°5'52" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Pangandaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Sementara luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 2.708,82 km², dengan panjang garis pantai sekitar 54,4 km dan luas daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) sebesar 306 km². Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan yang terdiri dari 351 desa. Tiga Kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km² atau 7,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.3 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Nama Tasikmalaya menimbulkan berbagai penafsiran. Ada beberapa yang menafsirkan mengenai arti Tasikmalaya. Pertama, Tasikmalaya terbentuk dari dua kata yaitu tasik yang berarti *keusik* atau pasir dan laya yang berarti *ngalayah* atau menghampar. Jadi, Tasikmalaya diartikan sebagai *keusik ngalayah* atau pasir yang

menghampar. Kedua, Tasikmalaya terbentuk dari dua kata yaitu tasik yang berarti telaga, danau, atau air yang menggenang dan malaya yang berarti jajaran gunung-gunung. Jadi, Tasikmalaya diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak. Ketiga, Tasikmalaya berasal dari kata tasik yang berarti danau, awalan kata kerja ma- dan laya yang berarti mati. Jadi, Tasikmalaya diartikan sebagai danau yang di dalamnya banyak mayat terapung-apung. Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mangabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kunci Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan. Kerajaan Galunggung ini berdiri sejak tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 Masehi.

Pemerintahan selanjutnya yaitu pemerintahan di Sukakarta dengan ibukota Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya). Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan di Sukapura dengan Bupati pertamanya yaitu Wirawangsa dan memindahkan ibukota ke Leuwiloa Sukaraja. Nama Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai bupatinya. Kemudian, tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan sebagai Hari Jadi

Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung. Berikut adalah pejabat yang pernah menjadi Bupati Tasikmalaya sejak nama Sukapura berubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 3.1
Daftar Nama-Nama Bupati Kabupaten Tasikmalaya beserta
Periode Jabatannya

1	R.A.A Wiratanuningrat	(1908 – 1937)
2	R.Tumenggung Wiradipoetra	(1938 – 1944)
3	R. Tumenggung Aria Soenarya	(1944 – 1947)
4	R. Abas Wilagasomantri	(1948– 1951)
5	R. Priatnakusumah	(1951 – 1957)
6	R. Ipung Gandapraja	(1957 – 1958)
7	R. Memet Supartadirja	(1958 – 1966)
8	Kol. Inf. Husen Wangsaatmadja	(Feb. 1955 – 14 Feb 1974)
9	Drs. H. Kartiwa Suryasaputra	(14 Feb. 1947 – 5 Maret 1976)
10	Kol. Inf. A. Benyamin	(5 Maret 1976 – 5 Maret 1981)
11	Kol. Inf. H. Hudly Bambang Aruman	(5 Maret 1981 – 5 Mart 1986)
12	Kol. Inf. H. Adang Roosman	(8 Maret 1986 – 8 Maret 1991)
13	Kol. Inf. H. Suiljana Wirata Hadisubrata	(8 Maret 1991 – 8 Maret 2001)
14	Drs. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd	(8 Maret 2001 – 8 Maret 2011)
15	H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E	(8 Maret 2011 – 7 September 2018)
16	H. Ade Sugianto, S.I.P	(Pelaksana Tugas dari 7 September 2018 sampai sekarang)

Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Tasikmalaya

3.1.4 Gambaran Umum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Tasikmalaya

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, untuk penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari Sekertariat Daerah; Inspektorat; Sekertariat DPRD; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan daerah; Badan Pengelola

Keuangan dan Aset daerah; Badan Pengelola Pendapatan Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama, serta seluruh kecamatan dan kelurahan yang tersebar di wilayah kabupaten Tasikmalaya sebagai SKPD kabupaten Tasikmalaya.

Sumber: <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/layanan-publik/alamat-skpd>.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Mohammad Nasir, 2015:54).

Sedangkan yang dimaksud dengan survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Sugiyono, 2009)

Berdasarkan perspektif dimensi/horizon waktu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *cross sectional* yaitu, penelitian yang dilakukan dimana data hanya diambil satu kali, pada suatu periode waktu, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian (Eti, Ratih, dan Abdul, 2007:74).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. (Sekaran, 2006:115).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah”**. Ketiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang tidak terikat pada variabel lain dan mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel lain (Sugiyama, 2008:58). Dalam hal ini yang menjadi variabel independennya adalah:

- a. Pengawasan Melekat (X_1).
- b. Pemeriksaan Internal (X_2)

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen (Sugiyama, 2008:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah (Y).

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat di lihat dalam Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pengawasan Melekat (X_1) Variabel Independen	Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana	Syarat keberhasilan pengawasan melekat, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian manajemen yang kondusif 2. Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko 3. Aktivitas pengendalian yang memadai 4. Informasi dan	Skor	Interval

	kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Inpres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres No. 1 Tahun 1983).	komunikasi yang efektif		
		5. Adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut		
		6. Faktor manusia dan budaya, diantaranya : a. Kemampuan kepemimpinan, keteladanan, disiplin, dedikasi pimpinan b. Prestasi pegawai c. Partisipasi pegawai d. Kejujuran dan keteladanan setiap pimpinan e. Kemampuan pimpinan		
		Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/KeputusanPAN_046-2004.pdf).		
Pemeriksaan Internal (X ₂) Variabel Independen	Pemeriksaan Internal atau Audit Internal diartikan sebagai segala komponen baik berupa proses, elemen maupun kegiatan yang terjalin erat dan berfungsi untuk meyakinkan agar segala tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan menuju kearah tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan cara seefisien mungkin. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015:6)	Pemeriksaan internal menjadi penting sebagai perlu adanya kontrol secara organisasi untuk menentukan: 1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif	Skor	Interval
		Menurut Badan		

			Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI Tahun 2015 (dalam Sistem Pengawasan Melekat, pengawasan Fungsional, Pengawasan Politis, Pengawasan Masyarakat, <i>Social Control</i>)		
Pencegahan <i>Fraud</i> Pemberian Hibah Variabel Dependen	pada Dana (Y)	<i>Fraud</i> merupakan penipuan menunjukkan representasi palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain dengan maksud untuk menipu dan mendorong pihak lain untuk benar-benar mengandalkan fakta yang merugikan. Menurut Hall (2011:113) dalam bukunya " <i>Principles of Accounting Information Systems</i> " Sedangkan Hibah adalah pemberian sejumlah dana maupun barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 188/PK.07/2012. Sehingga pengertian dari kata	Pencegahan <i>fraud</i> berisi prosedur yang meliputi: 1. Mengevaluasi proses <i>governance</i> dengan tujuan: a. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan terhadap ketentuan hukum, regulasi, etika, dan perikatan b. Menilai tingkat kepatuhan oprasional perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan c. Menilai respon manajemen terhadap suatu resiko bisnis dalam kaitannya dengan pengendalian yang berkenaan dengan pengamanan asset, reliabilitas informasi berikut teknologi informasi yang digunakan d. Mengembangkan perencanaan audit untuk mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> 2. Mereview program pengelolaan resiko <i>fraud</i> atau <i>fraud control plan</i> , atau <i>anti-fraud policy</i> , dengan tujuan: a. Memastikan bahwa manajemen merancang dan mengimplementasikan program pengelolaan resiko <i>fraud</i> b. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan program resiko <i>fraud</i> diterapkan dan berfungsi sebagaimana	Skor	Interval

pencegahan *fraud* pada pemberian dana hibah adalah proses, cara, tindakan menahan agar suatu tindak kecurangan, merugikan, menipu dalam suatu organisasi dengan pihak tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pemberian sejumlah dana maupun barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

mestinya
 c. Memastikan mekanisme *whistleblowing* berfungsi sebagaimana mestinya dan setiap informasi yang diterima ditindaklanjuti oleh manajemen
 d. Menyediakan informasi yang berguna sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atas program pengelolaan risiko *fraud*

3. Meriview kelayakan perancangan dan efektifitas implementasi pengendalian internal untuk:

- a. Memastikan bahwa unsur, prinsip, dan fokus pengendalian internal diterapkan dan berfungsi dalam pelaksanaannya, serta memastikan bahwa integrasi unsur-unsur pengendalian internal mampu merespon risiko secara cepat
- b. Menilai risiko pengendalian internal
- c. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian
- d. Menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen untuk memperbaiki pengendalian internal secara berkesinambungan

Menurut Tedi Rustendi. 2018. *Fraud; Pencegahan dan Pengungkapannya dalam Perspektif Audit Internal*. Bandung: Mujahid Press.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber asli dan dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (Sugiyono, 2008:20).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain OPD di wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya), dengan kata lain data sekunder adalah interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya diperlukan sebagai bahan rujukan (Sugiyono, 2008:21).

3.2.3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. (Sugiyono, 2009:80).

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan sistem pengawasan melekat dan pemeriksaan internal pemerintahan dalam kaitannya dengan pencegahan *fraud* pada seluruh instansi pemerintah yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi :

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

NO	SKPD Kabupaten Tasikmalaya
1	Sekretariat Daerah
2	Inspektorat
3	Sekretariat DPRD
4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Dinas Sosial
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
17	Dinas Pertanian
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Dinas Lingkungan Hidup
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
28	Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama

Sumber: <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/layanan-publik/alamat-skpd>

3.2.3.3 Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2009:81) Teknik penarikan sampel adalah suatu proses seleksi sejumlah elemen yang memadai dari populasi, agar mengkaji dan memahami karakteristik sampel, sehingga akan memungkinkan melakukan generalisasi elemen-elemen tersebut pada populasi (Sekaran, 2006:266).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2009:84)

Metode ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* (sampling bertujuan), yakni dengan mengambil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel dalam penelitian ini. Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2009:85)

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
 5. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
 6. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh belas (17) Dinas (seluruh dinas yang menjadi populasi penelitian OPD) yang berada di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Responden penelitian adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan menggunakan tes, maka “responden” penelitian ini menjadi “*testee*” (yang dites). Responden penelitian dapat diartikan sebagai subjek penelitian, atau seseorang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Responden dari rencana penelitian ini dibagi atas 2 bagian berdasarkan variabel judul yang sesuai, yaitu pengawasan melekat kaitannya dengan pemberian wewenang pengawasan atasan terhadap bawahan yang menjadi respondennya adalah bawahan sebagai objek penilai dari survey di level SUBBAG (Sub Bagian). Sedangkan pemeriksaan internal dan pencegahan *fraud* dengan menggunakan objek penilai di level KABBAG (Kepala Bagian) atau kepala dinas terkait pada setingkat PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada dalam ruang lingkup dinas yang memiliki tugas secara spesifik untuk pengurusan dana hibah atau pemberian sejumlah dana.

Adapun sampel dan responden yang akan digunakan sebanyak tujuh belas (17) Dinas yang berada di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Sampel Penelitian

NO	SKPD	ALAMAT
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Dalem Wirawangsa Km 1.2 Telp. 0265 548686 Faxes. (0265) 548686
2	Dinas Kesehatan	Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng bypass Singaparna Kab. Tasikmalaya telp/ Faxes (0265) 2553155
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl Mangunreja-Sukaraja Km. 1.200 Tasikmalaya Telp (0265) 548786
4	Dinas Sosial	Jl. Sukapura Komplek Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Telp. (0265)333156
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB	Jl. Pemuda no. 2B Telp/Fax (0265) 313036
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplek Perkantoran Pemda Jl. Raya Sukapura Singaparna Telp./Fax. (0265) 330172
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.6 No 283B Telp (0265)330165

8	Dinas Pertanian	Jl. Bojongkoneng Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya Kode Pos 46415 Telp/Fax (0265) 330163
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	JL. Jend. Ahmad Yani, No. 128, Sukamanah, Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat 46131 Telp. (0265) 339693
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Jl. Mayor Utarya No. 1 telp./Fax. (0265) 333154
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl Mayor Utarya No.1 Lt. II, Kota Tasikmalaya Kode Pos 46113 Tlp. (0265) 2353587 Fax. (0265) 2353587
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Singaparna kodepos 46415 Telp./Fax. (0265)2553101
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jl. Mangunreja-Sukaraja Km 1,2 Telp./Faxes (0265) 548787
14	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bojongkoneng Bypass - Singaparna Telp./Fax (0265) 327001
15	Dinas Perhubungan	Jl. Raya Timur No. 254-A Cintaraja Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Telp./Fax. (0265) 543114
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jalan Pemuda Nomor 8 Tasikmalaya telp.(0265) 330162 fax.(0265) 330162
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl.Sukapura II Komplek Perkantoran Singaparna Telp (0265) 546531 Fax 0265 – 546432

Sumber: <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/layanan-publik/alamat-skpd>.

3.2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui kuesioner (*questionnaires*), kuesioner adalah daftar isian terstruktur yang diajukan oleh penulis kepada responden yang berhubungan erat dengan topik permasalahan, kuesioner yang penulis ajukan kepada responden mengacu kepada indikator dari variabel independen

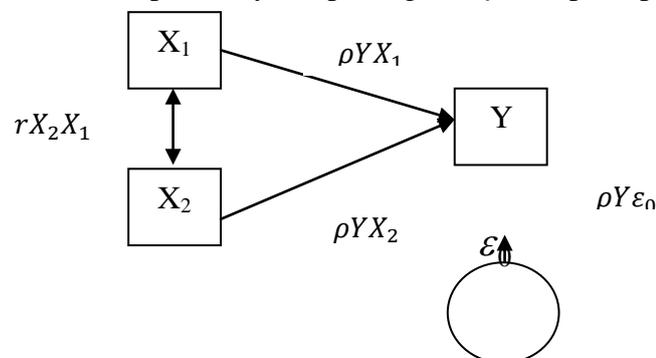
maupun variabel dependen. Penulis menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup (*closed question*). Kuesioner dengan pertanyaan tertutup meminta responden memilih salah satu atau mungkin beberapa jawaban dari satu set jawaban yang telah disediakan dan ditetapkan oleh peneliti (Sugiama, 2008:159).

2. Studi Kepustakaan (*Library and Internet Study*), Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk diperolehnya informasi dengan tingkat reliabilitas dan validitas memadai.

3.3 Model / Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini yakni Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen yaitu Pengawasan Melekat (X_1) dan Pemeriksaan internal (X_2), serta Satu Variabel Dependen yaitu pencegahan *fraud* pada pemberian dana hibah (Y).



Gambar 3.1

Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Pengawasan Melekat

X_2 = Pemeriksaan Internal

Y = Pencegahan *fraud* pada pemberian dana hibah

ε = Pengaruh faktor lain yang tidak di teliti

$r_{X_2X_1}$ = Koefisien korelasi Variabel X_1 terhadap X_2

ρ_{YX_1} = Koefisien Jalur Variabel X_1 terhadap Y

ρ_{YX_2} = Koefisien Jalur Variabel X_2 terhadap Y

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku, instrumen penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasi data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistik yang diterapkan.

Adapun perubahan instrumen meliputi:

1. Pendefinisian operasionalisasi variabel kedalam indikatornya.
2. Menjabarkan indikator kedalam pernyataan.
3. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden.

Format kuesioner untuk memuat pernyataan responden berbentuk *multiple choice*, dengan kelebihan mudah ditabulasi dan tepat untuk kuesioner yang diisi sendiri. Untuk analisis kuantitatif maka pemberian skor untuk setiap item kuesioner digunakan skala Likert yang jumlahnya ganjil dengan nilai 1 sampai 5.

Skala likert adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju (*strongly disagree*) atau sangat setuju (*strongly agree*) terhadap objek psikologis yang dinilainya (Sugiama, 2008:98).

Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden adalah menggunakan skala interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk suatu set objek dengan jarak yang sama antara satu ciri atau sifat objek maupun kejadian yang diukur (Sugiama, 2008:81). Pemberian skala ini mengacu pada pernyataan Uma Sekaran (2006:197) : “Angka-angka dalam skala Likert dapat dirancang menunjukkan skala interval”.

Item-item yang disusun harus terdiri dari item positif dan negatif. Adapun daftar pernyataan dengan menetapkan skala likert pada alternatif jawaban yang didapat akan dinilai dengan skor sebagai berikut:

Tabel 3.5

Skor untuk Setiap Pernyataan

Pilihan Jawaban	Jawaban untuk item positif	Jawaban untuk item negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Tidak Ada Pendapat	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: Sugiyono, 2009:94

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1 Pengujian Validitas Alat Ukur

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang di gunakan mengukur apa yang perlu di ukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu : *content validity*, *construct validity* , dan *pengujian validitas eksternal* (Sugiyono, 2009:123).

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (*product moment*) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

x = Skor tiap item variabel x

y = Jumlah skor seluruh item variabel x

n = Jumlah responden

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditentukan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

3.4.2.2 Pengujian Realibilitas Alat Ukur

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda (Nur Indrianto dan Bambang Sutomo, 2002).

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiono, 2012: 365). *Cronbach's Alpha* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

α = Koefisien reliabilitas alpha

k = Banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah variasi butir

σ_t^2 = Variasi total

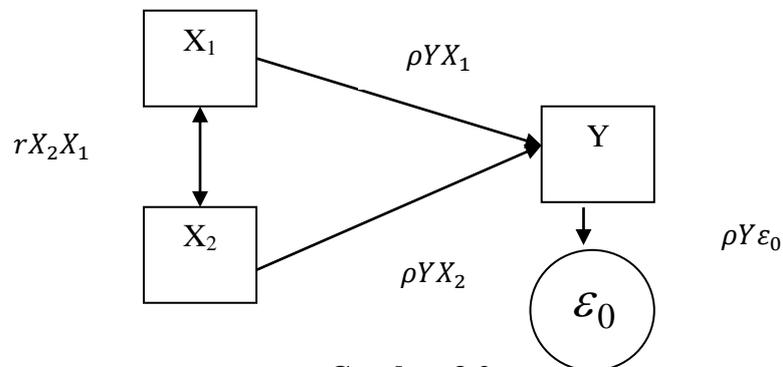
Koefisien reliabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis *cronbach alpha* yaitu jika nilai koefisien ≥ 0.70 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al : 1998).

3.4.3 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variable independen dengan variable dependen dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. (Paul Webley 1997).

Berikut ini akan diterjemahkan sebuah diagram jalur :



Gambar 3.2
Struktur Path Analysis

Keterangan:

X_1 = Pengawasan Melekat

X_2 = Pengendalian Internal

Y = Pencegahan *fraud* pada Pemberian Dana Hibah

ε = Pengaruh faktor lain yang tidak di teliti

$r_{X_2X_1}$ = Koefisien korelasi Variabel X_1 terhadap X_2

ρ_{YX_1} = Koefisien Jalur Variabel X_1 terhadap Y

ρ_{YX_2} = Koefisien Jalur Variabel X_2 terhadap Y

1. Menghitung koefisien korelasi (r)

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara X_1 dengan X_2 . Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r_{X_i X_j} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_{ih} X_{jh} - \sum_{h=1}^n X_{ih} \sum_{h=1}^n X_{jh}}{\sqrt{\left[n \sum_{h=1}^n X_{ih} - \left(\sum_{h=1}^n X_{ih} \right)^2 \right] \left[n \sum_{h=1}^n X_{jh} - \left(\sum_{h=1}^n X_{jh} \right)^2 \right]}}$$

(Sumber: Sitepu, 1994:19)

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat. Demikian jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2009 : 184

2. Pengujian secara simultan

Pengujian secara simultan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\rho_{YX_i} = b_{YX_i} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n X_i h^2}{\sum_{h=1}^n Y h^2}} \quad (\text{Sumber: Sitepu, 1994:19})$$

Keterangan:

ρ_{YX_i} = Koefisien jalur dari variabel X_i terhadap variabel Y

b_{YX_i} = Koefisien regresi variabel X_i terhadap variabel Y

3. Pengujian Faktor Residu/ Sisa

$$\rho_{Y_i \varepsilon} = \sqrt{1 - R^2_{Y_i X_1 X_2 \dots X_k}}$$

Di mana $R^2_{Y X_1 X_2 \dots X_k} = \sum_{i=1}^k \rho_{Y_i X_i} r_{Y X_i}$

4. Pengujian Hipotesis

Menguji keberartian (signifikan) dari hubungan variabel bebas X_i dengan variabel X_j

$H_0 : r_{X_2 X_1} = 0$

$H_a : r_{X_2 X_1} \neq 0$

Dengan kriteria penolakan H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

a. Pengujian secara simultan

$H_0 : \rho_{Y X_1} = \rho_{Y X_2} = \rho_{Y X_3} = 0$

$H_a : \rho_{Y X_1} = \rho_{Y X_2} = \rho_{Y X_3} \neq 0$

Dengan kriteria penolakan H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Uji signifikansi menggunakan rumus:

$$F = \frac{(n - k - 1) R^2_{Y X_1 X_2 \dots X_k}}{k (1 - R^2_{Y X_1 X_2})}$$

Statistik uji ini mengikuti distribusi F dengan derajat bebas $V_1 = k$ dan $V_2 = n - k - 1$

b. Pengujian secara parsial

Hipotesis operasional:

$H_0 : \rho_{Y X_i} = 0$

Ha : $\rho_{YX_i} \neq 0$

Dengan kriteria penolakan Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Uji statistik menggunakan rumus :

$$t_i = \frac{\rho_{YX_i}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{YX_1 \dots X_k})}{(n - k - 1)(1 - R_{X_1 X_1 \dots (X_i) \dots X_k})}}}; i = 1, 2, \dots, \quad (\text{Sitepu, 1994:28})$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1

Mencari pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Antar Variabel Penelitian

No	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel X_1 $Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y : (PYX_1)^2 = A$	-	A
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melalui $X_2 Y \leftarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$ $(\rho_{YX_1})(r_{X_1 X_2})(\rho_{YX_2}) = B$	B
	Total pengaruh $X_1 \rightarrow Y$	-	A + B = C
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel X_2 $Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y : (PYX_2)^2 = D$	-	D
3.	Total pengaruh X_1 dan $X_2 \rightarrow Y$ secara simultan (C+D)		E
4.	Pengaruh faktor residu $\varepsilon_0 \rightarrow \rho_Y \varepsilon_0$ dengan rumus (1-E)		F
	Total pengaruh		1

Dalam proses perhitungan *path analysis* di atas, penulis menggunakan software SPSS 16.0.

3.4.4 Prosedur Pengujian Hipotesis

Penetapan Hipotesis Operasional

- $H_{01}, \rho = 0$: Pengawasan Melekat tidak berhubungan terhadap Pemeriksaan Internal.
- $H_{a1}, \rho \neq 0$: Pengawasan Melekat berhubungan terhadap Pemeriksaan Internal.
- $H_{02}, \rho = 0$: Pengawasan Melekat secara parsial tidak berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.
- $H_{a2}, \rho \neq 0$: Pengawasan Melekat secara parsial berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.
- $H_{03}, \rho = 0$: Pemeriksaan Internal secara parsial tidak berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.
- $H_{a3}, \rho \neq 0$: Pemeriksaan internal secara parsial berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.
- $H_{04}, \rho = 0$: Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal secara simultan tidak berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.
- $H_{a4}, \rho \neq 0$: Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal secara simultan berhubungan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah.

Penetapan tingkat signifikansi

Taraf signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5%, ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95%, atau

toleransi kemelesetan 5%. Taraf signifikansi ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Uji signifikansi

Untuk menguji signifikansi dilakukan dalam dua pengujian yaitu:

a) Secara parsial memakai uji t

Untuk menguji hipotesis parsial maka dapat dilakukan pengujian yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \sqrt{\frac{n-(k+1)}{1-r^2}}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

r = Nilai Korelasi parsial

k = Jumlah variabel indepeden

Pengujian uji t telah dilakukan maka hasil pengujian tersebut t hitung dibandingkan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

b) Secara simultan memakai uji F

Pada uji simultan uji statistik yang digunakan adalah uji F untuk menghitung nilai

F secara manual dapat menggunakan rumus F berikut ini:

$$F_{hitung} = \frac{(n - k - 1) R^2}{k (1 - R^2)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Nilai untuk uji F dilihat dari tabel distribusi F dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (k; n-k-1), selanjutnya F_{hitung} bandingkan dengan F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_a diterima.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, H_a ditolak.

Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya itu diterima atau tidak.